



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**



Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar (80235)



Disdikpora Provinsi Bali



Disdikpora Provinsi Bali



Disdikpora Provinsi Bali



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SKjIP), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya kongkrit pemerintah dalam kerangka peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah ataupun perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sebagaimana wujud dari pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk memenuhi harapan dimaksud. Penyusunan LKjIP ini tentunya belum sempurna masih banyak hal yang perlu diperbaiki, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Bali, 18 Pebruari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh:
	KEPALA DINAS
	<b>Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, S.T., M.Si.</b>
	Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19740221 200003 1 005



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Sumber Daya Aparatur.....	4
1.5. Sumber Daya Keuangan .....	6
1.6. Isu-isu Strategis.....	7
1.7. Dasar Hukum.....	7
1.8. Sistematika Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Perencanaan Strategis.....	12
2.2. Arah Kebijakan.....	14
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	17
2.4. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan.....	17
2.5. Rencana Anggaran .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1. Capaian Kinerja .....	38
3.2. Realisasi Anggaran .....	72
3.3. Inovasi .....	78
BAB IV PENUTUP.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah pada hakekatnya diperlukan proses pembaharuan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Semangat reformasi yang perlu segera diwujudkan melalui pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur.

Sebagai upaya menerapkan prinsip – prinsip *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah dirancang dan ditetapkan agar berorientasi pada hasil dan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali menyusun LKjIP sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.



## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut :

### 1. Tugas.

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

### 2. Fungsi.

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga dan pembinaan bahasa dan sastra yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. penyelenggaraan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki tanggungjawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 345 sekolah, yang terdiri atas 90 SMA Negeri, 73 SMA Swasta, 58 SMK Negeri dan 109 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 3 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan,



Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali terdiri dari :

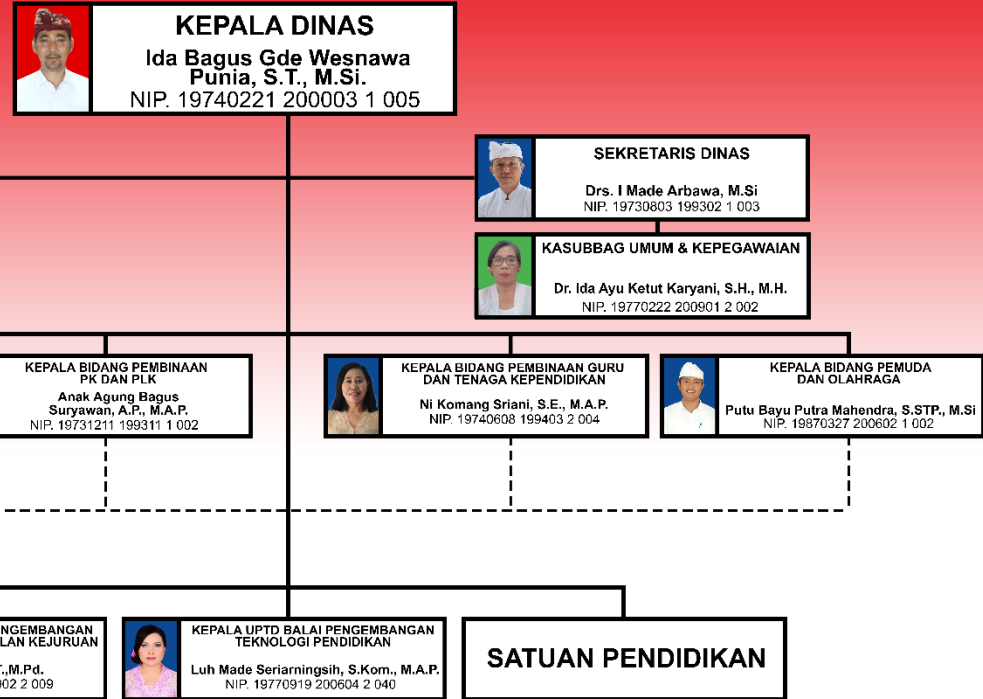
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pembinaan SMA
4. Bidang Pembinaan SMK
5. Bidang Pembinaan PK dan PLK
6. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Bidang Pemuda dan Olahraga
8. UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
9. UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
10. Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) dan Satuan Pendidikan Khusus (SLB)





# STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



#### 1.4. Sumber Daya Aparatur

Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025 dengan jumlah total 10.393 orang terdiri atas 9.384 orang (90.29%) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.009 orang (9.71%) dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk Tenaga ASN terdiri dari 156 orang (1.66%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 101 orang (1.08%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga ASN terkonsentrasikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 257 orang (2.74%) dengan status PNS dan tenaga ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 9.127 orang (97.26%) terdiri atas 4.291 orang (45.73%) PNS dan 4.836 orang (51.53%) PPPK, dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 158 orang (1.68%), Analis SDM sebanyak 86 orang (0.92%), Pustakawan sebanyak 6 orang (0.06%), Guru PNS sebanyak 3.596 orang, Pelaksana sebanyak 445 orang (4.74%), Guru PNS sebanyak 3.596 orang (38.32%) dan guru PPPK sebanyak 4.120 orang (43.90%). Secara golongan, dari 9.384 orang ASN, Golongan IV a/b/c/d sebanyak 2.110 orang (22.49%); Golongan III a/b/c/d sebanyak 2.112 orang (22.51%); Golongan II a/b/c/d sebanyak 222 orang (2.37%); Golongan I a/b/c/d sebanyak 3 orang (0.03%) dan Golongan IX (PPPK) sebanyak 4.485 orang (47.79%), Golongan VII (PPPK) sebanyak 409 orang (4.36%), Golongan V (PPPK) sebanyak 43 orang (0.46%). Keadaan Tenaga Kontrak sebanyak 1.009 orang yang terdistribusikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 126 orang (12.49%) dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SLB Negeri) sebanyak 883 orang (87.51%) Sebagaimana ditampilkan ke dalam Tabel 1.1; Tabel 1.2; dan Tabel 1.3.

Tabel. 1.1  
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdikpora Provinsi Bali Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	
		(orang)	(%)
A.	ASN Disdikpora Provinsi Bali	257	2,74%
B.	ASN pada Satuan Pendidikan:	9127	97,26%
	1. PNS sebagai Kepala Sekolah	158	1,68%
	2. PNS sebagai Analis SDM	86	0,92%
	3. PNS sebagai Guru	3596	38,32%



	4. PNS sebagai Pustakawan	6	0,06%
	5. PNS sebagai Pelaksana	445	4,74%
	6. PPPK Guru	4120	43,90%
	7. PPPK Pelaksana	716	7,63%
	<b>Total ASN</b>	<b>9.384</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, 2025.

Tabel. 1.2  
ASN Disdikpora Provinsi Bali berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah PNS	
		(Orang)	(%)
1	Golongan IV a/b/c/d	2110	22,49%
	Golongan IV a	600	6,39%
	Golongan IV b	862	9,19%
	Golongan IV c	645	6,87%
	Golongan IV d	1	0,01%
	Golongan IV e	2	0,02%
2	Golongan III a/b/c/d	2112	22,51%
	Golongan III a	175	1,86%
	Golongan III b	871	9,28%
	Golongan III c	261	2,78%
	Golongan III d	805	8,58%
3	Golongan II a/b/c/d	222	2,37%
	Golongan II a	12	0,13%
	Golongan II b	8	0,09%
	Golongan II c	46	0,49%
	Golongan II d	156	1,66%
4	Golongan I a/b/c/d	3	0,03%
5	Golongan IX PPPK	4485	47,79%
6	Golongan VII PPPK	409	4,36%
7	Golongan V PPPK	43	0,46%
	<b>TOTAL</b>	<b>9.384</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, 2025.



Tabel. 1.3  
Keadaan Tenaga Kontrak Disdikpora Provinsi Bali Tahun 2025

No	Tenaga Kontrak	Jumlah	(%)
A.	Tenaga Kontrak di Disdikpora Prov. Bali	126	12,49%
	1. Sekretariat	41	4,06%
	2. Bidang Pembinaan SMA	10	0,99%
	3. Bidang Pembinaan SMK	10	0,99%
	4. Bidang Pembinaan PK, dan PLK	11	1,09%
	5. Bidang Pembinaan GTK	5	0,50%
	6. Bidang Pemuda dan Olahraga	31	3,07%
	7. UPTD BPTEKDIK	10	0,99%
	8. UPTD BPTKK	8	0,79%
B.	Tenaga Kontrak pada Satuan Pendidikan	883	87,51%
	<b>Total</b>	<b>1.009</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, 2025.

### 1.5. Sumber Daya Keuangan

Tabel.1.4  
Anggaran Belanja Disdikpora Provinsi Bali tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	BELANJA OPERASI	Rp1.832.396.095.357,00	Rp1.789.489.793.111,00	(Rp42.906.302.246,00)	(2.40)
	01 Belanja Pegawai	Rp1.317.702.881.213,00	Rp1.291.832.286.219,00	(Rp25.870.594.994,00)	(2.00)
	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp356.668.914.144,00	Rp336.969.206.892,00	(Rp19.699.707.252,00)	(5.85)
	05 Belanja Hibah	Rp158.024.300.000,00	Rp160.688.300.000,00	Rp2.664.000.000,00	1.66
2	BELANJA MODAL	Rp223.268.798.100,00	Rp239.184.241.136,00	Rp15.915.443.036,00	6.65
	02 Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp83.137.597.420,00	Rp86.026.350.543,00	Rp2.888.753.123,00	3.36
	03 Belanja modal gedung dan bangunan	Rp120.646.116.400,00	Rp121.144.116.400,00	Rp498.000.000,00	0.41
	05 Belanja Modal aset tetap lainnya	Rp19.485.084.280,00	Rp32.013.774.193,00	Rp12.528.689.913,00	39.14
	<b>Jumlah belanja</b>	<b>Rp2.055.664.893.457,00</b>	<b>Rp2.028.674.034.247,00</b>	<b>(Rp26.990.859.210,00)</b>	<b>(1.31)</b>

Sumber : Tim Kerja Keuangan Disdikpora Prov. Bali 2025.



## 1.6. Isu - Isu Strategis

Dalam perspektif pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga jangka pendek dapat diinventarisir berbagai isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan.
3. Belum optimalnya pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti peserta didik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam mendukung kemandirian dan daya saing pemuda.
5. Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga.

## 1.7. Dasar Hukum

Ketentuan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Institusi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 32);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah



beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 33);

19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64);



## 1.8. Sistematika Laporan

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Latar Belakang  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Struktur Organisasi  
Sumber Daya Aparatur  
Sumber Daya Keuangan  
Isu – Isu Strategis  
Dasar Hukum  
Sistematika Laporan

### **BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Strategis  
Arah Kebijakan  
Indikator Kinerja Utama  
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan  
Rencana Anggaran

### **BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian Kinerja  
Realisasi Anggaran

### **BAB IV          PENUTUP**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), dokumen perencanaan tersebut ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra PD digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah, acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja), menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Sehubungan dengan telah dilantiknya jabatan Kepala Daerah serentak secara Nasional tahun 2025 maka sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota agar menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dan seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD serta sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2025-2029



memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Bali dan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Rencana Strategis sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Rencana Strategis dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan Rencana Strategis tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rencana Strategis secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Dalam hal ini Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mencermati hasil identifikasi masalah serta untuk merealisasikan program Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali selanjutnya merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

Berdasarkan RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali 2025-2029, tujuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yaitu : “Meningkatnya Kualitas Pendidikan serta Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga”.



Dalam rangka menjabarkan tujuan yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan efektif maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyusun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Pemuda
3. Meningkatnya Prestasi Olahraga

## 2.2. Arah Kebijakan

Dalam rangka penyelarasan Arah Kebijakan pembangunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dengan RPJMD Provinsi Bali, maka dalam proses perumusan arah kebijakan tersebut telah berpedoman pada Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali dan arah kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal ini sebagai wujud adanya kesinambungan perencanaan pembangunan dari pusat ke daerah. Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas, berikut ini tabel yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan digunakan dalam mewujudkan Pembangunan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan  
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan serta Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>2. Dukungan Pembiayaan Pendidikan</li> <li>3. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan</li> <li>2. Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran</li> <li>3. Menyediakan biaya personil bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera-II untuk bersekolah</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5. Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Pembinaan Aparatur dan Manajemen Satuan Pendidikan</li> <li>7. Peningkatan Prestasi Peserta Didik</li> <li>8. Penguatan Kurikulum Muatan Lokal</li> <li>9. Memantapkan peran sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pasraman non formal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemenuhan SPM Pendidikan</li> <li>5. Pendataan dan Penjaringan ATS bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota</li> <li>6. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>7. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Digital</li> <li>8. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan karir Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>9. Melaksanakan reuiu RKAS, Kurikulum, dan Rapor Pendidikan</li> <li>10. Penguatan peran Pengawas/Pendamping dalam melakukan pendampingan di Satuan Pendidkan</li> <li>11. Pengembangan talenta melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (kegiatan lomba sains, seni, dan olahraga di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)</li> <li>12. Penguatan Literasi dan Numerasi peserta didik</li> <li>13. Penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal</li> <li>14. Revitalisasi SMK dalam rangka menjadikan SMK Pusat Keunggulan</li> <li>15. Pendidikan dan pelatihan vokasi link and match dengan DU/DI</li> <li>16. Pengembangan SMK menjadi Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)</li> <li>17. Menyediakan bahan ajar/bahan bacaan untuk penguatan kurikulum muatan lokal</li> <li>18. Mengembangkan sekolah sebagai pusat pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, penguatan dan pembudayaan nilai-nilai kearifan lokal melalui pasraman kilat.</li> </ol>
	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran organisasi kepemudaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan sistem manajemen dan kebijakan organisasi kepemudaan secara terpadu dan berkelanjutan</li> <li>2. Mengembangkan talenta dan kompetensi kepemudaan dalam</li> </ol>



		<p>2. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda</p>	<p>upaya mewujudkan pemuda mandiri dan kreatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Perluasan kesempatan pemuda memperoleh pelatihan dan keterampilan</li> <li>4. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, pemuda kader dan kepemimpinan dalam mendukung pembangunan</li> <li>5. Menyelenggarakan forum diskusi pemuda dan kolaborasi dalam penguatan peran pemuda</li> <li>6. Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda</li> <li>7. Pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi</li> <li>8. Pengembangan pendidikan Kepramukaan.</li> </ol>
	<p>Meningkatnya prestasi atlet pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi</p>	<p>Penguatan system Pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga layanan khusus bersinergi dengan lembaga/organisasi keolahragaan.</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan dan partisipasi kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>3. Pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan</li> <li>4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar</li> <li>5. Pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi</li> <li>6. Pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>7. Peningkatan pola kemitraan dengan wirausaha dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga pariwisata.</li> </ol>



### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran atas kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan menengah	101,50%
		Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Baik	93,10%
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	61%
		Persentase Prestasi Olahraga	51,55%

### 2.3. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2025, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan menengah	101,50%
		Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Baik	93,10%
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	61%
		Persentase Prestasi Olahraga	51,55%



No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.336.384.678.703
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 631.110.920.522
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 79.999.100
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.949.998.400
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 84.427.532.632
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 1.500.000.000
7	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 126.764.100
8	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 85.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 2.055.664.893.457</b>

## 2.4. Rencana Anggaran

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melaksanakan 27 kegiatan, 95 Sub Kegiatan dari 11 program yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Bali dan DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025 dengan Pagu Induk Rp 2.055.664.893.457 (*Dua triliun lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor DPPA/B.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 September 2025 menjadi 27 kegiatan, 96 Sub Kegiatan dari 11 program dengan anggaran perubahan sebesar Rp 2.028.674.034.247 (*Dua triliun dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*). Berdasarkan dokumen perubahan APBD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 26.990.859.210 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah*).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Tabel 2.3.  
Rincian Anggaran Belanja Disdikpora  
Provinsi Bali Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN INDUK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) (Rp)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.334.652.716.095	1.307.121.003.386	(27.531.712.709)
2	Program pengelolaan Pendidikan	629.823.284.522	623.701.468.661	(6.121.815.861)
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	79.999.100	60.319.100	(19.680.000)
4	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.949.998.400	10.986.468.200	9.036.469.800
5	Program pengembangan daya saing keolahragaan	84.427.532.632	82.570.020.100	(1.857.512.532)
6	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
7	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.057.648.366	834.206.065	(223.442.301)
8	Program Pengelolaan Pendidikan	1.287.636.000	1.163.362.000	(124.274.000)
9	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	674.314.242	575.748.635	(98.565.607)
10	Program pengembangan kurikulum	126.764.100	102.298.100	(24.466.000)
11	Program pengembangan Bahasa dan sastra	85.000.000	59.140.000	(25.860.000)
<b>TOTAL :</b>		<b>2.055.664.893.457</b>	<b>2.028.674.034.247</b>	<b>(26.990.859.210)</b>



Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025
1	2					3	4	5	6	7	8
						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				2.052.433.530.749,00	2.025.939.279.447,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.964.555.999.717,00	1.930.882.791.147,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.964.555.999.717,00	1.930.882.791.147,00
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai	81.75 Nilai	1.334.652.716.095,00	1.307.121.003.386,00
	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	319.855.900,00	185.200.900,00
	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	150.331.500,00	77.429.500,00
	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	169.524.400,00	107.771.400,00
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan	59 Laporan	1.319.237.313.513,00	1.293.262.292.519,00
	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10680 Orang/ Bulan	10680 Orang/ Bulan	1.317.702.881.213,00	1.291.832.286.219,00



1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	1.284.575.800,00	1.284.575.800,00	
1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	249.856.500,00	145.430.500,00	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	4 Jenis	4 Jenis	766.145.000,00	766.145.000,00
1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	766.145.000,00	766.145.000,00	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 Persen	100 Persen	68.193.400,00	68.193.400,00
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	68.193.400,00	68.193.400,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.213.431.810,00	1.129.444.610,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	47 Paket	467.715.560,00	616.832.360,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	95.000.000,00	95.000.000,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.840.000,00	10.840.000,00	



1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	31.526.250,00	31.526.250,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	608.350.000,00	375.246.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	9.847.361.472,00	8.509.311.957,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	978.222.150,00	978.222.150,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.869.139.322,00	7.531.089.807,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen	100 Persen	3.200.415.000,00	3.200.415.000,00
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	954.685.000,00	954.685.000,00	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	1.977.200.000,00	1.977.200.000,00	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	268.530.000,00	268.530.000,00	



2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun	100 Persen	86.24 Persen	629.823.284.522,00	623.701.468.661,00
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Keamanan SMA Iklim Kebinekaan SMA Inklusivitas SMA Kemampuan Literasi SMA Kemampuan Numerasi SMA	60.75 Nilai 75.00 Nilai 88.50 Indeks 93.50 Indeks 98.50 Indeks	64.71 Indeks 68.26 Nilai 75.75 Indeks 80.61 Nilai 86.19 Indeks	295.956.385.118,00	293.515.552.474,00
	1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)					
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8 Unit	8 Unit	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00
	1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula					
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah					
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	10 Paket	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00
	1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	5 Paket	382.366.000,00	382.366.000,00
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas					
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta didik	300 Peserta didik	4.704.150.000,00	4.704.150.000,00
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	2.782.735.000,00	2.768.028.800,00
	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1249 Orang	1249 Orang	31.956.434.118,00	27.034.056.126,00



1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	105.000.000,00	77.120.000,00	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	155 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	162.820.000,00	125.380.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas					
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	156 Satuan Pendidikan	161.691.130.000,00	165.426.169.948,00	
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas					
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	90 Orang	90 Orang	57.409.900,00	57.409.900,00	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	85.899.900,00	76.299.900,00	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	44.690.000,00	44.690.000,00	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Ruang	14 Ruang	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00	
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Orang	900 Orang	104.996.800,00	86.942.800,00	



1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	12.027.637.000,00	10.881.822.600,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim Keamanan SMK Iklim Kebinekaan SMK Skor Kemampuan Literasi SMK Skor Kemampuan Numerasi SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	56.85 Nilai 69.55 Nilai 79.50 Persen 85.50 Indeks 90.85 Persen 93.00 Indeks 97.00 Indeks	62.48 Indeks 64.28 Nilai 72.12 Indeks 73.74 Indeks 76.59 Nilai 80.06 Persen 93.40 Persen	307.988.995.724,00	305.551.944.844,00
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)					
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	22.212.384.000,00	22.612.384.000,00	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	11.150.616.000,00	11.150.616.000,00	
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah					
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	3.914.925.900,00	3.914.925.900,00	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	32 Paket	47.370.185.000,00	47.370.185.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan					
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360 Peserta didik	360 Peserta didik	5.393.781.500,00	5.633.745.400,00	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680 Peserta Didik	680 Peserta Didik	2.955.825.000,00	1.718.208.400,00	



1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1325 Orang	1325 Orang	20.272.868.244,00	16.854.550.194,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	105.000.000,00	88.862.000,00	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	172 Satuan Pendidikan	172 Satuan Pendidikan	522.432.000,00	460.992.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan					
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	175 Satuan Pendidikan	180.529.850.000,00	182.279.551.870,00	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan					
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	172 Orang	172 Orang	64.000.000,00	51.250.000,00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	56.800.000,00	37.600.000,00	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	112.160.000,00	68.960.000,00	
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah					
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	10 Ruang	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00	



1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik					
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	9.211.539.880,00	9.211.539.880,00	
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Orang	900 Orang	104.628.200,00	86.574.200,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SDLB Iklim Inklusivitas SMALB Iklim Inklusivitas SMPLB Iklim Keamanan SDLB Iklim Keamanan SMALB Iklim Keamanan SMPLB Iklim Kebinekaan SDLB Iklim Kebinekaan SMALB Iklim Kebinekaan SMPLB Skor Kemampuan Literasi SDLB Skor Kemampuan Literasi SMALB Skor Kemampuan Literasi SMPLB Skor Kemampuan Numerasi SDLB Skor Kemampuan Numerasi SMALB Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	62.00 Nilai 67.00 Nilai 70.00 Nilai 73.50 Nilai 77.50 Nilai 77.75 Nilai 88.70 Indeks 89.50 Indeks 92.50 Indeks 93.25 Indeks 93.50 Indeks 98.50 Indeks	72.83 Nilai 74.63 Indeks 74.78 Indeks 75.13 Indeks 76.53 Indeks 76.77 Nilai 78.10 Indeks 78.13 Nilai 78.30 Indeks 78.80 Indeks 78.93 Indeks 80.45 Nilai 83.17 Indeks 85.52 Nilai 85.73 Nilai	25.877.903.680,00	24.633.971.343,00
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus					
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2337 Peserta Didik	2337 Peserta Didik	3.533.566.200,00	3.523.966.200,00	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.593.966.000,00	1.322.189.000,00	



1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	149 Orang	149 Orang	4.649.915.980,00	3.487.687.843,00
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	900.976.300,00	752.324.300,00
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	14 Satuan Pendidikan	10.808.510.000,00	11.264.294.800,00
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	60 Orang	60 Orang	15.547.600,00	15.547.600,00
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	14 Dokumen	138.370.000,00	90.910.000,00
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14 Dokumen	14 Dokumen	16.171.600,00	16.171.600,00
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1.978.000.000,00	1.918.000.000,00
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	362.880.000,00	362.880.000,00



3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	100 Persen	100 Persen	79.999.100,00	60.319.100,00
	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	66.5 Persen	66.5 Persen	79.999.100,00	60.319.100,00
	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus					
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen	39.999.400,00	26.079.400,00
	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	3 Laporan	39.999.700,00	34.239.700,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				87.877.531.032,00	95.106.488.300,00
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				87.877.531.032,00	95.106.488.300,00
4	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	72 Persen	72 Persen	1.949.998.400,00	10.986.468.200,00
	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	91 Orang	91 Orang	1.949.998.400,00	10.986.468.200,00
	2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi					
							Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		1450 Orang		9.731.599.800,00
	2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda					
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	75 Orang	75 Orang	648.324.000,00	36.390.000,00



	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi					
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.900,00	148.051.900,00	
	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi					
						Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	100 Persentase	199.900.000,00	192.831.500,00	
	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi					
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	90 Orang	90 Orang	788.299.500,00	778.887.500,00	
	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi					
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	90 Orang	90 Orang	113.475.000,00	98.707.500,00	
5	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50.50 Persen	50.50 Persen	84.427.532.632,00	82.570.020.100,00
	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	5 Kejuaraan	5 Kejuaraan	24.076.132.632,00	21.493.180.100,00
	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga					
						Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	250 Orang	250 Orang	15.823.596.500,00	14.310.452.700,00	
	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi					
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan	5 Kegiatan	8.252.536.132,00	7.182.727.400,00	



	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	180 Orang	180 Orang	351.400.000,00	316.840.000,00	
	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi						
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	351.400.000,00	316.840.000,00	
	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59 Organisasi	59 Organisasi	60.000.000.000,00	6081000000	
	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait						
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000.000,00	60.760.000.000,00	
6	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	53 Persen	53 Persen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	53 Persen	53 Persen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi						
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	



Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

						UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan			2.345.284.366,00	1.997.568.065,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.345.284.366,00	1.997.568.065,00	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.345.284.366,00	1.997.568.065,00	
7	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai	81.75 Nilai	1.057.648.366,00	834.206.065,00
1	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	193.656.100,00	169.801.800,00
1	01	01	1.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	140.162.500,00	139.084.200,00
1	01	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3.499.600,00	3.499.600,00
1	01	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	49.994.000,00	27.218.000,00
1	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	755.752.266,00	556.164.265,00
1	01	01	1.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	755.752.266,00	556.164.265,00
1	01	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen	100 Persen	108.240.000,00	108.240.000,00
1	01	01	1.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	98.400.000,00	98.400.000,00



	1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel					
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.440.000,00	1.440.000,00	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	
8	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK	80.00 Persen	80.00 Persen	1.287.636.000,00	1.163.362.000,00
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	90 Sekolah	90 Sekolah	755.613.000,00	685.647.000,00
	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	720 Orang	720 Orang	101.970.000,00	94.290.000,00	
	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12 Konten Digital	12 Konten Digital	52.774.000,00	14.040.000,00	
	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	130 Orang	130 Orang	37.908.000,00	31.636.000,00	
	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	91 Satuan Pendidikan	91 Satuan Pendidikan	562.961.000,00	545.681.000,00	
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	58 Sekolah	58 Sekolah	532.023.000,00	477.715.000,00
	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 Orang	600 Orang	84.000.000,00	77.760.000,00	



1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	10 Konten Digital	40.386.000,00	13.950.000,00	
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	120 Orang	37.646.000,00	31.374.000,00	
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik					
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	369.991.000,00	354.631.000,00	



## Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

## Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

						UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan			886.078.342,00	722.630.735,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			886.078.342,00	722.630.735,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			886.078.342,00	722.630.735,00	
9	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai	81.75 Nilai	674.314.242,00	575.748.635,00
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	100 Persen	42.106.600,00	32.440.600,00
	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.613.000,00	8.613.000,00
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.547.600,00	6.547.600,00
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	26.946.000,00	17.280.000,00
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	541.397.642,00	452.498.035,00
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	541.397.642,00	452.498.035,00
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	100 Persen	90.810.000,00	90.810.000,00
	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	90.810.000,00	90.810.000,00



10	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60.25 Persen	60.25 Persen	126.764.100,00	102.298.100,00
	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	1 Kurikulum	1 Kurikulum	87.100.800,00	67.654.800,00
	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	72 Orang	72 Orang	87.100.800,00	67.654.800,00
	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1 Kurikulum	1 Kurikulum	39.663.300,00	34.643.300,00
	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	39.663.300,00	34.643.300,00
11	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70.60 Nilai	70.60 Nilai	85.000.000,00	59.140.000,00
	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	87.30 Persen	87.30 Persen	85.000.000,00	59.140.000,00
	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi					
							Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	225 Peserta Didik	225 Peserta Didik	85.000.000,00	59.140.000,00
<b>J U M L A H</b>										<b>2.055.664.893.457,00</b>	<b>2.028.674.034.247,00</b>



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Disdikpora Provinsi Bali 2025-2029. Akuntabilitas Kinerja terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan secara menyeluruh dan terpadu.

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melaksanakan 27 kegiatan, 95 sub kegiatan dari 11 program yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Bali dan DAK yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025 dengan Pagu Induk Rp 2.055.664.893.457 (*Dua triliun lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor DPPA/B.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 September 2025 menjadi 27 kegiatan, 96 Sub Kegiatan dari 11 program dengan anggaran perubahan sebesar Rp 2.028.674.034.247 (*Dua triliun dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*). Berdasarkan dokumen perubahan APBD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 26.990.859.210 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025 merupakan pelaksanaan awal dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2025-2029. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada prestasi kerja keluaran (*outcome/output*) program atau kegiatan. Penilaian berpatokan pada Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan sebagai kontrak kinerja antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditentukan dengan realisasi pencapaian kinerja berdasarkan data pendukung yang terukur. Penilaian kinerja diukur mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali diukur menggunakan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. Berikut disampaikan hasil pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagai berikut :



Tabel 3.2. Capaian Kinerja Utama (sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	META INDIKATOR	CAPAIAN (TAHUN SEBELUMNYA)				2025			CAPAIAN NASIONAL TAHUN 2025	KET.
				2021	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	Perbandingan penduduk disemua usia yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah dengan jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase	91,08	100,51	98,57	94,52	101,50	96,11	94,69	89,55	Kriteria Sangat Tinggi
		Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Baik	Perbandingan sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang memperoleh akreditasi baik (A/B) dengan seluruh sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan dinyatakan dalam persentase	98,28	93,85	94,49	96,12	93,10	94,93	101,97	-	Kriteria Sangat Tinggi



1	2	3	4	6	7	8	10	10	11	12	13	14
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	Perbandingan jumlah pemuda yang memperoleh prestasi/juara dalam bidang seni dan budaya, iptek, kewirausahaan, industri kreatif dan olahraga dengan seluruh pemuda dan dinyatakan dalam persentase	10	15	30,5	60,10	61	82	134,43	-	Kriteria Sangat Tinggi
		Persentase Prestasi Olahraga	Perbandingan jumlah atlit yang memperoleh medali/juara dalam kejuaraan olahraga ditingkat regional, nasional, dan internasional (Pra POPNAS, POPNAS, PON, PEPARNAS, PEPARPENAS, PORNAS, KEJURNAS, SEA GAMES, ASIAN GAMES, OLIMPIADE) dengan seluruh atlit binaan Provinsi Bali dan dinyatakan dalam persentase	50	50,3	50,6	52,86	51,55	53,41	103,61	-	Kriteria Sangat Tinggi

Sumber : BPS, Profil Pendidikan, Bidang PSMA, Bidang PSMK, Bidang PK PLK dan Bidang PORA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Sesuai uraian tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi kedalam 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan keempat indikator tersebut juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Ketercapaian sasaran strategis **meningkatnya kualitas dan akses pendidikan** didukung dengan peningkatan **Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah** dan peningkatan **persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi baik** sedangkan ketercapaian sasaran strategis **Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga** didukung dengan peningkatan **persentase prestasi pemuda** dan **persentase prestasi olahraga**.

Berdasarkan target yang telah direncanakan pada tahun 2025 untuk masing - masing sasaran strategis melalui keempat indikator pengukurannya, jika membandingkan dengan realisasinya terdapat tiga indikator yang telah memenuhi/melampaui target, yaitu : Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Baik, Persentase Prestasi Pemuda dan Persentase Prestasi Olahraga, dan terdapat satu indikator yang belum memenuhi target, yaitu : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan menengah. Secara skala nilai peringkat kinerja mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa seluruh capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025 termasuk dalam kriteria **Sangat Tinggi ( $91 \leq 100$ )**.

Terhadap keempat indikator sasaran strategis yang tertuang dalam tabel diatas, tergambar bahwa terdapat dua indikator yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu : Persentase Prestasi Pemuda dan Persentase Prestasi Olahraga serta masih terdapat dua indikator yang mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan realisasi capaian kinerja dari tahun ke tahun (2021-2025), yaitu : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah dan Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Baik.

Berikut disampaikan **analisis keberhasilan/kegagalan** beserta **alternatif solusi/langkah antisipasi** pada masing-masing indikator kinerja sesuai sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut :



## 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah

APK Pendidikan Menengah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk pada semua usia yang masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Menengah (umur 16-18 tahun). APK ini menunjukkan daya serap penduduk yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah jenjang pendidikannya.

Capaian APK Pendidikan Menengah di Provinsi Bali pada tahun 2025 lebih tinggi dari capaian secara nasional, sudah memenuhi target dari yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 2,76%, hal ini dapat diasumsikan bahwa penduduk Bali yang bersekolah telah meningkat dari tahun lalu. Jika ditinjau berdasarkan realisasi capaian dari tahun ke tahun (2021-2025) telah terjadi fluktuatif kenaikan dan penurunan. Terhadap hal tersebut perlu adanya upaya dan strategi yang lebih inovatif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menuntaskan pendidikannya minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat) baik ditempuh melalui jalur pendidikan formal maupun non formal (Paket C).

### **Hambatan :**

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih cukup tinggi di Provinsi Bali dengan berbagai faktor penyebab, yaitu : anak bekerja karena adanya hambatan ekonomi, anak dalam pernikahan dini, anak terlantar akibat kehilangan pengasuhan dari orang tua, anak di daerah terpencil karena disparitas geografis, dan anak berkebutuhan khusus/difabel
- Data valid Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai basis data penanganan anak tidak sekolah belum tersedia secara akurat
- Kurangnya motivasi anak untuk menuntaskan pendidikannya dan cenderung ingin cepat bekerja di sektor non formal
- Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan antar Kabupaten/Kota



### Langkah Antisipasi :

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut :

- Melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang pentingnya mengenyam pendidikan untuk membentuk generasi yang mandiri dan berdaya saing
- Berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil PMD, Dinas Sosial P3A, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pemuktahiran data Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam upaya penanganan ATS
- Revitalisasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi : pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah yang aksesibilitas/keterjangkauan sekolah masih sulit/jauh dan wilayah yang kekurangan daya tampung sebagai dampak sistem zonasi/domisili, pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium, pembangunan/rehabilitasi ruang praktik siswa, pembangunan/rehabilitasi sarana utilitas lainnya, pengadaan media pembelajaran, dan pengadaan alat praktik siswa dengan menggunakan basis data Dapodik berdasarkan skala prioritas dan azas ketuntasan
- Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan mengutamakan jalur zonasi/domisili dan afirmasi. Jalur zonasi/domisili memungkinkan sekolah untuk mengakomodir seluruh penduduk usia sekolah di lingkungan terdekat sedangkan jalur afirmasi memungkinkan penduduk dari golongan ekonomi kurang mampu dan/atau disabilitas mendapatkan jaminan untuk melangsungkan pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
- Pemberian dana pendamping BOSDA untuk menunjang operasional Satuan Pendidikan sehingga dapat meminimalkan pungutan/sumbangan bagi orang tua/wali siswa.
- Penyaluran PIP khusus bagi siswa kurang mampu
- Bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dapat memfasilitasi akses anak putus sekolah agar dapat menempuh pendidikannya kembali melalui jalur formal maupun non formal (Paket A,B,C)



## 2. Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Baik

Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi baik merupakan perbandingan sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat) dan pendidikan khusus (SLB) yang memperoleh akreditasi baik (A/B) dengan seluruh jumlah sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus baik negeri maupun swasta.

Dalam era pendidikan yang semakin dinamis, akreditasi merupakan salah satu komponen penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang komprehensif terhadap kelayakan mutu satuan pendidikan. Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mendorong satuan pendidikan dalam meningkatkan inovasi, akuntabilitas dan transparansi, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) yang berada dibawah koordinasi Kemdikdasmen yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan profesional. Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta yang akan melaksanakan akreditasi wajib memenuhi syarat, antara lain : memiliki surat keputusan pendirian/operasional sekolah, memiliki peserta didik, memiliki sarana prasarana pendidikan, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan telah beroperasi minimal dua tahun.

Terhadap capaian persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi baik pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 1,19 % namun memenuhi target dari yang telah ditetapkan, secara umum jika ditinjau berdasarkan realisasi capaian dari tahun ke tahun (2021-2025) telah terjadi fluktuatif kenaikan dan penurunan. Terhadap hal tersebut perlu adanya upaya dan strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan kualitas sekolah khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Bali.

### **Hambatan :**

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :



- Pembangunan sejumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota belum memenuhi syarat untuk memperoleh akreditasi (keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan ketersediaan guru, belum beroperasi selama dua tahun)
- Keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mengakibatkan sejumlah sekolah swasta belum memperoleh akreditasi baik atau terakreditasi

### **Langkah Antisipasi :**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut :

- Revitalisasi sarana prasarana Pendidikan baik di sekolah Negeri maupun Swasta yang meliputi : ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang kantor, dan sarana utilitas lainnya
- Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, bimtek pemanfaatan media pembelajaran digital, dan forum guru mata pelajaran
- Reviu dan penelaahan RKAS, Kurikulum, dan Rapor Satuan Pendidikan
- Pembinaan aparatur dan tata kelola manajemen Satuan Pendidikan (MBS)
- Penguatan peran Pengawas Sekolah dalam melakukan pendampingan di Satuan Pendidikan

### **3. Persentase Prestasi Pemuda**

Persentase Prestasi Pemuda merupakan perbandingan jumlah pemuda yang memperoleh prestasi/juara dalam bidang seni dan budaya, iptek, kewirausahaan, industri kreatif dan olahraga dengan seluruh pemuda di Bali.

Pemuda adalah warga negara usia 16-30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan sebagai tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki semangat dan fisik yang kuat, memiliki wawasan pengetahuan luas dan lintas batas, inovatif serta memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda sebuah bangsa akan sulit mengalami kemajuan dan perubahan.



Selain peran dan partisipasinya dalam mendukung pembangunan bangsa, pemuda perlu diberi dorongan motivasi dan ruang seluas-luasnya agar terlibat dalam berbagai ajang seleksi dan kompetensi yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan, pengenalan potensi diri, membentuk mental dan kepribadian, serta perolehan prestasi. Pada tahun 2025 berbagai ajang seleksi dan kompetensi dilaksanakan yang meliputi seleksi pemuda pelopor, seleksi pertukaran pemuda antar negara, seleksi pertukaran pemuda antar provinsi, seleksi kreativitas pemuda dan seleksi Gita Bahana Nusantara.

Terhadap capaian persentase prestasi pemuda pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2024 sebesar 21,9% dan melampaui target dari yang telah ditetapkan, secara umum terjadi peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahun (2021-2025). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya minat pemuda Bali berpartisipasi dalam berbagai ajang seleksi dan kompetensi untuk meraih prestasi dan mengembangkan potensi dirinya agar lebih kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

#### **Hambatan :**

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- Dekadensi moral, pergaulan bebas, pengangguran, kekerasan, dan penyalahgunaan minuman keras/narkoba dikalangan pemuda yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan penyalahgunaan media teknologi informasi komunikasi.
- Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam mendorong kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.

#### **Langkah Antisipasi :**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut :

- Pemberdayaan pemuda melalui berbagai kegiatan seleksi, mentoring dan pembinaan pemuda pelopor, kepemimpinan, dan wirausaha muda
- Penguatan peran organisasi kepemudaan melalui pembinaan dan pendampingan secara intensif
- Pelatihan digital yang memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis bagi pemuda milenial



- Penyelenggaraan seminar, workshop, diskusi panel untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi dan kreativitas antar pemuda serta meningkatkan pemahaman pemuda terhadap keimanan, jati diri, kemandirian, dan wawasan kebangsaan untuk menghindari dari segala pengaruh negatif teknologi informasi dan pergaulan bebas.
- Pemberian apresiasi dan penghargaan bagi pemuda berprestasi
- Peningkatan kapasitas kepramukaan melalui pemberian bantuan hibah kepada Kwarda Bali. Gerakan pramuka akan dapat mengembangkan karakter, kemandirian, dan kreativitas pemuda

#### 4. Persentase Prestasi Olahraga

Persentase Prestasi Olahraga merupakan perbandingan jumlah atlet yang memperoleh medali/juara dalam kejuaraan olahraga ditingkat regional, nasional, dan internasional (Pra POPNAS, POPNAS, PON, PEPARNAS, PEPARPENAS, PORNAS, KEJURNAS, SEA GAMES, ASIAN GAMES, OLIMPIADE) dengan seluruh atlet binaan Provinsi Bali.

Olahraga merupakan segala bentuk aktivitas fisik seseorang yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani dan rohani. Secara umum olahraga terbagi kedalam beberapa golongan, yaitu :

**Olahraga prestasi** adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan

**Olahraga pendidikan** adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani

**Olahraga rekreasi** adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan

Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan di tingkat Provinsi pada tahun 2025 adalah Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR), Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (PEPARPEPROV), Sepak Bola Amatir, Invitasi



Olahraga Tradisional sedangkan keikutsertaan kontingen provinsi Bali dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga di tingkat Nasional meliputi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS XVII), Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS XI), SEA GAMES dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII NTB.

Terhadap capaian persentase prestasi olahraga pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 0,55% dan melampaui target dari yang telah ditetapkan, secara umum terjadi peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahun (2021-2025). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya prestasi dan perolehan medali para atlit yang telah dibina dalam berbagai ajang kejuaraan olahraga baik di tingkat Provinsi, Regional, Nasional, dan Internasional.

#### **Hambatan :**

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- Terbatasnya anggaran (APBD) sehingga terbatasnya cabang olahraga yang diikuti dalam pekan kejuaraan
- Keterbatasan fasilitas dan peralatan olahraga yang memenuhi standar

#### **Langkah Antisipasi :**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut :

- Mengupayakan anggaran melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak - pihak terkait (sponsorship) sehingga tidak menghambat pelaksanaan kejuaraan
- Pembibitan dan pembinaan tenaga keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan
- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar untuk mendukung kelancaran pembinaan atlet dan pelatih serta mendukung penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- Penguatan peran organisasi keolahragaan melalui pembinaan dan pendampingan yang intensif
- Pemberian apresiasi dan penghargaan bagi atlit berprestasi



Berikut kami sampaikan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Tujuan/Sasaran Straegis (IKU)	Indikator Sasaran	2025			Indikator Program	2025			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan menengah	101,50	96,11	94,69	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun	100,00	90,68	90,68	623.701.468.661	583.991.558.678	93,63	0,99
		Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Baik	93,10	94,93	101,97	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri	52,25	91,87	175,83				
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun	100,00	67,96	67,96					



						Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	90,00	90,00	100,00	1.163.362.000	1.123.287.164	96,56	0,99
						Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	100,00	100,00	100,00	60.319.100	45.962.020	76,20	0,99
						Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	63,75	64,75	101,57	102.298.100	95.798.952	93,65	0,99
						Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70,60	73,60	104,25	59.140.000	47.768.880	80,77	0,99
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	61	82	134,43	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	82,72	83,40	100,82	10.986.468.200	3.984.301.480	36,27	0,99
						Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	60,60	90,40	149,17	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	0,99
		Persentase Prestasi Olahraga	51,55	53,41	103,61	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	53,39	53,41	100,04	82.570.020.100	80.766.558.344	97,82	0,99



Berikut disampaikan hasil capaian kinerja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan**

No	Tujuan/Sasaran Sraegis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (disdikpora)</b>	<b>83,87 nilai</b>	<b>Menunjang</b>
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Menunjang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Menunjang
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu</b>	<b>59 laporan</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.680 orang/bulan	Menunjang
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 dokumen	Menunjang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 dokumen	Menunjang
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>4 jenis</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Menunjang
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	Menunjang
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>90 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	Menunjang
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Menunjang		
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Menunjang		



		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Menunjang
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan</b>	<b>97 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	Menunjang
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	Menunjang
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	Menunjang
2	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun</b>	<b>90,68 persen</b>	<b>Menunjang</b>
			<b>Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri</b>	<b>95,97 persen</b>	<b>Menunjang</b>
			<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun</b>	<b>67,96 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>Iklim Keamanan SMA Iklim Kebinekaan SMA Inklusivitas SMA Kemampuan Literasi SMA Kemampuan Numerasi SMA</b>	<b>75.30 indeks 74.75 nilai 63.21 indeks 80.01 nilai 66.66 indeks</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8 unit	Menunjang
		Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 unit	Menunjang
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 peserta didik	Menunjang
		Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 peserta didik	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	540 orang	Menunjang
		Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	118 orang	Menunjang
		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	155 satuan Pendidikan	Menunjang
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	156 satuan Pendidikan	Menunjang
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	90 orang	Menunjang
		Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	Menunjang
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen	Menunjang
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 ruang	Menunjang		



Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	909 orang	Menunjang
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	89 satuan Pendidikan	Menunjang
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>Iklim Inklusivitas SMK Iklim Keamanan SMK Iklim Kebinekaan SMK Skor Kemampuan Literasi SMK Skor Kemampuan Numerasi SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</b>	<b>60.18 indeks 72.54 nilai 70.82 indeks 75.29 indeks 62.08 nilai 79.52 persen 91.87 persen</b>	<b>Menunjang</b>
Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 unit	Menunjang
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 unit	Menunjang
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 paket	Menunjang
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	32 paket	Menunjang
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360 peserta didik	Menunjang
Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680 peserta didik	Menunjang
Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.152 orang	Menunjang
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	76 orang	Menunjang
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	172 satuan Pendidikan	Menunjang
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	175 satuan pendidikan	Menunjang
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	172 orang	Menunjang
Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	Menunjang
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen	Menunjang
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 ruang	Menunjang
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	58 satuan Pendidikan	Menunjang
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	900 orang	Menunjang
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>Iklim Inklusivitas SDLB Iklim Inklusivitas SMALB Iklim Inklusivitas SMPLB Iklim Keamanan SDLB Iklim Keamanan SMALB Iklim Keamanan SMPLB Iklim Kebinekaan SDLB Iklim Kebinekaan SMALB Iklim Kebinekaan SMPLB Skor Kemampuan Literasi SDLB</b>	<b>73.33 nilai 76.50 indeks 73.73 indeks 82.67 indeks 77.00 indeks 77.73 nilai 73.78 indeks 76.80 nilai 74.73 indeks 71.23 indeks</b>	<b>Menunjang</b>



		<b>Skor Kemampuan Literasi SMALB</b> <b>Skor Kemampuan Literasi SMPLB</b> <b>Skor Kemampuan Numerasi SDLB</b> <b>Skor Kemampuan Numerasi SMALB</b> <b>Skor Kemampuan Numerasi SMPLB</b>	<b>85.02 indeks</b> <b>85.23 nilai</b> <b>76.17 indeks</b> <b>77.63 nilai</b> <b>80.20 nilai</b>	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	Menunjang
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.337 peserta didik	Menunjang
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	156 peserta didik	Menunjang
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	112 orang	Menunjang
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 satuan Pendidikan	Menunjang
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	14 satuan Pendidikan	Menunjang
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	60 orang	Menunjang
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 dokumen	Menunjang
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14 dokumen	Menunjang
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	Menunjang
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 satuan Pendidikan	Menunjang
3	<b>Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik</b>	<b>100 persen</b> <b>Menunjang</b>
		<b>Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>	<b>Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal</b>	<b>67 persen</b> <b>Menunjang</b>
	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 dokumen	Menunjang
	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 laporan	Menunjang
4	<b>Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga Meningkatkan kualitas tata kehidupan Pemuda berdasarkan nilai-nilai Jana Kerthi</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan</b>	<b>83,4 persen</b> <b>Menunjang</b>
		<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah pemuda yang berprestasi</b>	<b>163 orang</b> <b>Menunjang</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 orang	Menunjang
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	1 orang	Menunjang



Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 dokumen	Menunjang
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	8,60 persen	Menunjang
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	163 orang	Menunjang
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 orang	Menunjang
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi</b>	<b>51,82 persen</b>	<b>Menunjang</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	<b>Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Diselenggarakan</b>	<b>5 kejuaraan</b>	<b>Menunjang</b>
Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	250 orang	Menunjang
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 kegiatan	Menunjang
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>	<b>Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional</b>	<b>180 orang</b>	<b>Menunjang</b>
Sub Kegiatan Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 dokumen	Menunjang
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan</b>	<b>59 organisasi</b>	<b>Menunjang</b>
Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 dokumen	Menunjang
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka</b>	<b>60 persen</b>	<b>Menunjang</b>
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 laporan	Menunjang

**UPTD BPTEKDIK**

		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			
1	Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>83,87 nilai</b>	<b>Menunjang</b>
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 paket	Menunjang
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Menunjang



		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Menunjang
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	Menunjang
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	Menunjang
<b>Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK</b>	<b>80,00 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK</b>	<b>90 sekolah</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	720 orang	Menunjang
		Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	14 konten digital	Menunjang
		Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	249 orang	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	91 satuan Pendidikan	Menunjang
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK</b>	<b>58 sekolah</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 orang	Menunjang
		Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12 konten digital	Menunjang
		Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	227 orang	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	59 satuan Pendidikan	Menunjang
<b>UPTD BPTKK</b>					
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pendidikan</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>83,87 nilai</b>	<b>Menunjang</b>
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	Menunjang
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>100 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Menunjang
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan</b>	<b>51,17 persen</b>	<b>Menunjang</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Menunjang



2	Meningkatnya pelayanan pelayanan pendidikan berbasis Kearifan Lokal pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	64,75 persen	Menunjang
		<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	1 kurikulum	Menunjang
		Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	72 orang	Menunjang
		<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</b>	<b>Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan</b>	1 kurikulum	Menunjang
		Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	20 orang	Menunjang
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA</b>	<b>Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan</b>	73,60 nilai	Menunjang
		<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali</b>	87,39 persen	Menunjang
		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	225 peserta didik	Menunjang

Sesuai sajian tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan 27 kegiatan, 96 sub kegiatan dari 11 program urusan layanan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan capaian output secara umum mencapai **100%** dan seluruhnya menunjang sasaran kinerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu :

- a. **Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan** : Memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu hak warga negara yang menjadi pondasi utama dalam pembangunan suatu negara. Perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan telah menjadi isu mendesak untuk diatasi, sehingga perlu mendapat perhatian serius oleh berbagai pihak. Dalam pemenuhannya diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terhadap berbagai kebijakan, sumber daya, dan langkah kongkrit kedepannya. Saat ini masih tercatat adanya masyarakat yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah (tuntas wajar 12 tahun). Persoalan disparitas geografis, ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial masih melatarbelakangi alasan anak-anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau putus sekolah.



- b. **Peningkatan Mutu Pendidikan** : Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu menuntut adanya pembenahan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Pendidikan yang berkualitas melibatkan guru-guru yang kompeten dan terampil, kurikulum yang relevan dan mutakhir, sarana prasarana yang memadai, serta metode pembelajaran yang inovatif. Muatan pembelajaran perlu dikembangkan dalam mendukung peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa, serta meningkatkan kesiapan siswa (SMK) untuk memasuki dunia kerja. Saat ini masih tercatat adanya satuan pendidikan yang belum memperoleh akreditasi Baik (A/B), sehingga kedepannya perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif serta dukungan sarana prasarana yang memadai dalam mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan perolehan akreditasinya.
- c. **Peningkatan Tata Kelola Pendidikan** : Tata kelola pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu sekolah. Tata kelola pendidikan yang baik harus mengandung nilai-nilai transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien, serta mampu mendorong terciptanya sinergitas antara lembaga pendidikan dan semua stakeholder (pemangku kepentingan). Saat ini seluruh satuan pendidikan telah melakukan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan upaya strategis dalam meningkatkan tata kelola sekolah yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan Pendidikan Nasional.
- d. **Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Pemuda** : Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam membangun kemajuan bangsa ke depan. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu diberdayakan dengan mengembangkan bakat dan talentanya untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda serta menjadikannya manusia yang tangguh, berdaya saing, mandiri dan mampu memanfaatkan kreativitas guna berkontribusi positif dalam pembangunan.



- e. **Peningkatan prestasi olahraga** : Pembibitan atlet olahraga merupakan tahap awal dalam penjurangan atlet - atlet berbakat yang akan berkompetisi dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional. Pembinaan para atlet dan pelatih olahraga perlu terus dilakukan guna memupuk dan meningkatkan kemampuan fisik, teknik, taktik dan kesiapan mental untuk menghasilkan atlet yang memiliki dedikasi, disiplin, dan inisiatif dalam upaya mencapai prestasi secara maksimal. Pemenuhan sarana prasarana olahraga juga perlu terus diupayakan untuk mendukung kelancaran pembinaan dan penyelenggaraan kejuaraan.

## Analisis Capaian program/kegiatan/sub kegiatan

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Merupakan program urusan kesekretariatan (Disdikpora dan 2 UPTD) yang terdiri atas 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan, program ini ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional perkantoran, pemenuhan kondisi gedung/kantor dan GOR agar tetap dalam kondisi baik, terpeliharanya peralatan gedung/kantor dan GOR dengan baik dan berkesinambungan, kegiatan administrasi pengelolaan keuangan, penatausahaan aset, kehumasan, kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah, serta kegiatan yang menunjang kualitas kinerja aparatur/pegawai. Selain itu program ini diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program **Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SAKIP)** dari **target** yang ditetapkan sebesar **81,75** dengan **realisasi capaian** tahun 2025 sebesar **83,87**, telah melampaui target dan terjadi **peningkatan** dari tahun 2024 sebesar 1,15. Kedepannya masih perlu dilakukan upaya peningkatan/perbaikan terhadap proses perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, akuntabilitas laporan keuangan, memperkuat SDM aparatur, penataan aset, monitoring dan evaluasi, serta mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

### 2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini merupakan program prioritas yang diorientasikan terhadap serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan (SDM, sarana, dan anggaran) secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pendidikan, yang terdiri atas 3 kegiatan, yaitu:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas,
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan
- c. Pengelolaan Pendidikan Khusus,

Program ini didukung dengan 51 sub kegiatan (Disdikpora dan UPTD), yang ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program, sebagai berikut :

**Tabel 3.7. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan**

No	Indikator Proram	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	85,17	100	90,68	90,68
2	Persentase Lulusan Siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri	92,30	50,25	95,97	190,99
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun	54,60	100	67,96	67,96
4	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	79,45	80,00	82,43	103,03

**Analisis Ketercapaian** Indikator Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun : menggambarkan perbandingan antara jumlah murid usia sekolah tersebut yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai. Pada tahun 2025 **realisasi capaian** sebesar **90,68%**, belum memenuhi dari **target** sebesar **100%**, namun terdapat **peningkatan** dari tahun 2024 sebesar 5,51%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menempuh pendidikan sampai jenjang SMA/ sederajat, namun sampai saat ini masih terdapat siswa putus sekolah yang perlu mendapatkan penanganan.
- b. Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkerja di dunia usaha/dunia industri: menggambarkan perbandingan antara jumlah lulusan siswa SMK yang telah diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri terhadap seluruh lulusan siswa SMK. Pada tahun 2025 **realisasi capaian** sebesar **95,97%**, jauh melampaui dari **target** sebesar **50,25%** dan terdapat **peningkatan** dari tahun 2024 sebesar 3,67%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya keterserapan lulusan siswa SMK yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha, peningkatan ini tidak terlepas dari



keberhasilan pelaksanaan pendidikan vokasi. Membaiknya angka kebekerjaan lulusan SMK juga berdampak pada menurunnya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS, Angka Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali tahun 2025 sebesar 1,49% lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 1,79%.

- c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun : menggambarkan perbandingan antara jumlah murid disabilitas usia sekolah tersebut yang bersekolah dengan jumlah penduduk disabilitas usia sekolah yang sesuai. Pada tahun 2025 **realisasi capaian** sebesar **67,96%**, belum memenuhi dari **target** sebesar **100%** namun terjadi **peningkatan** dari tahun 2024 sebesar 13,36%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terdapat penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang belum bersekolah di satuan pendidikan khusus.
- d. Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK : merupakan perbandingan sekolah jenjang SMA/SMK yang telah menerapkan pembelajaran berbasis digital dengan seluruh sekolah SMA/SMK di Provinsi Bali. Pada tahun 2025 **realisasi capaian** sebesar **82,43%**, telah **memenuhi target** dan terjadi **peningkatan** dari tahun 2024 sebesar 2,98%.

**Hambatan** atau **kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi kinerja program, sebagai berikut :

- Sampai saat ini masih terdapat siswa putus sekolah sebagai akibat dari faktor disparitas geografis, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan kurangnya penguatan keluarga
- Masih terbatasnya ketersediaan lowongan kerja diluar sektor pariwisata sehingga menjadi penghambat dalam penyaluran lulusan SMK ke dunia kerja diluar sektor pariwisata.
- Masih banyak masyarakat atau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus merasa enggan/malu menyekolahkan anaknya

**Pelaksanaan program/kegiatan** dalam rangka mendukung capaian realisasi kinerja program, meliputi :

- Revitalisasi sarana prasarana Pendidikan yang meliputi : Pembangunan Unit Sekolah Baru, pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, pembangunan/rehabilitasi sarana utilitas lainnya, pengadaan media pembelajaran, pengadaan alat praktik siswa, dan pengadaan mebeler sekolah.



**Tabel 3.8. Rekapitulasi Pembangunan Fisik Sekolah**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>SMA</b>						
1	UNIT SEKOLAH BARU	3 UNIT	1 UNIT	5 UNIT		
2	RUANG KELAS	48 RUANG	31 RUANG	37 RUANG	18 RUANG	15 RUANG
3	RUANG KANTOR/TU/GURU	3 RUANG	4 RUANG	1 RUANG	2 RUANG	
4	RUANG LABORATORIUM	4 RUANG	10 RUANG	4 RUANG	6 RUANG	5 RUANG
5	RUANG PERPUSTAKAAN					1 RUANG
6	RUANG SERBAGUNA/AULA/KETRAMPILAN					1 RUANG
7	SARANA UTILITAS (TOILET,PAGAR, TEMPAT SUCI, DLL)	2 PAKET		3 PAKET		13 PAKET
<b>SMK</b>						
1	UNIT SEKOLAH BARU	1 UNIT		4 UNIT		
2	RUANG KELAS	4 RUANG		7 RUANG	12 RUANG	25 RUANG
3	RUANG KANTOR/TU/GURU					
4	RUANG LABORATORIUM					3 RUANG
5	RUANG PRAKTEK SISWA	6 RUANG	3 RUANG	5 RUANG	5 RUANG	16 RUANG
6	RUANG PERPUSTAKAAN					
7	RUANG SERBAGUNA/AULA/KETRAMPILAN					1 RUANG
8	SARANA UTILITAS (TOILET,PAGAR, TEMPAT SUCI, DLL)	2 PAKET		1 PAKET		10 PAKET
<b>SLB</b>						
1	UNIT SEKOLAH BARU					
2	RUANG KELAS	26 RUANG	20 RUANG	5 RUANG		
3	RUANG KANTOR/TU/GURU					
4	RUANG LABORATORIUM					
5	RUANG PERPUSTAKAAN		1 RUANG			
6	RUANG SERBAGUNA/AULA/KETRAMPILAN	3 RUANG	9 RUANG	5 RUANG		1 RUANG
7	SARANA UTILITAS (TOILET,PAGAR, TEMPAT SUCI, DLL)	2 PAKET				1 PAKET

- Pemberian bantuan dana pendamping BOSDA untuk pembiayaan sesajen sekolah, perlengkapan sekolah, ATK, biaya personil siswa SMAN/SMKN Bali Mandara, dan bahan makanana/minumam siswa sekolah berasrama
- Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikdasmen
- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa melalui pelaksanaan aneka lomba di tingkat Provinsi dan Nasional (OSN, O2SN, FLS3N, Fiksi, dan LKS), serta penguatan karakter siswa.



Tabel 3.9. Rekapitulasi Perolehan Juara Lomba di Tingkat Nasional

NO	JENIS LOMBA	KATEGORI	PEROLEHAN MEDALI		
			EMAS	PERAK	PERUNGGU
<b>JENJANG SMA</b>					
1	O2SN	Pencak Silat Tunggal Baku Putra	0	0	0
		Pencak Silat Tunggal Baku Putri	0	0	0
		Karate Kata Putra	0	0	0
		Karate Kata Putri	0	0	0
2	FLS3N	Menyanyi Solo Putra	0	0	1
		Cerita Pendek	0	0	0
		Kriya	0	0	0
		Menyanyi Solo Putri	0	0	0
		Monolog	0	0	0
		Cipta Lagu	0	0	0
		Gitar Solo	0	0	0
		Musik Tradisional	0	1	0
		Film Pendek	0	0	0
		Jurnalistik	0	0	0
		Cipta Puisi	0	0	0
		Desain Poster	0	0	0
		Baca Puisi	0	0	0
		Fotografi	0	0	0
		Komik Digital	0	1	0
Tari kreasi	0	0	0		
<b>JENJANG SMK</b>					
1	O2SN	Pencak Silat Tunggal Baku Putra	0	0	0
		Pencak Silat Tunggal Baku Putri	0	0	0
		Karate Kata Putra	0	0	0
		Karate Kata Putri	0	0	0
2	FLS3N	Monolog	0	0	1
		Tari Kreasi	0	0	0
3	LKS	Farmasi	0	1	0
		Hotel Reception	0	1	0
		Teknologi Desain Grafis ( <i>Graphic Design Technology</i> )	0	1	0
		CAD Building ( <i>3D Modeling/Building Information Modeling</i> )	0	1	0
		Komputasi Awan ( <i>Cloud Computing</i> )	0	0	1
4	FIKSI	Fashion (Pengembangan Usaha)	1	0	0
<b>JENJANG SLB</b>					
1	O2SN	Atletik Lompat Jauh Putri	0	0	0
		Bocce Tunggal Putra	0	0	1
		Bocce Tunggal Putri	0	0	0
		Bulu Tangkis Tunggal Putra	0	0	0
		Tenis Meja Tunggal Putra	0	0	0
2	LKS	Hantaran	0	0	0
		Kecantikan	0	0	0
		Kreasi Barang Bekas	0	0	0
		Kriya Kayu	0	0	0
		Membatik	0	0	0
		Merangkai Bunga	1	0	0
		Tata Boga	0	0	0



		Tata Busana	0	0	1
		Teknologi Informasi	0	0	0
3	FLS3N	Cipta dan Baca Puisi	0	1	0
		Cipta Komik Strip	0	0	0
		Desain Grafis	0	0	0
		Melukis/Mewarnai SDLB	0	0	0
		Melukis SMPLB/SMALB	0	0	0
		Menyanyi SDLB	0	0	0
		Menyanyi SMPLB/SMALB	0	0	0
		MTQ	0	0	0
		Pantomim	0	0	0
		Gambar Ekspresi	1	0	0
		Bercerita/Story Telling	0	0	0
		Fashion Show	0	0	0
		Fotografi	0	0	0
		Menari	1	0	0
		Pencak Silat	0	0	0
		Vlog	0	0	0
Film Pendek	1	0	0		
<b>JUMLAH :</b>			<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kebijakan Pendidikan meliputi : pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pencegahan stunting, UKS, sekolah aman bencana dan aman dari tindak kekerasan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke satuan pendidikan terkait revitalisasi sarana prasarana sekolah, pengelolaan dana BOSP, penatausahaan aset, pembinaan aparatur dan manajerial, review kurikulum dan rapor pendidikan sebagai upaya dalam peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan serta mendukung pemenuhan SPM Pendidikan
- Pelaksanaan digitalisasi sekolah meliputi pelatihan penyusunan materi pembelajaran berbasis TIK bagi Guru dan pembinaan penggunaan aplikasi digital di Satuan Pendidikan
- Revitalisasi SMK meliputi pembuatan peta jalan pendidikan vokasi SMK, penyelarasan kurikulum dengan dunia industri, peningkatan sarana pratek siswa, pemagangan siswa, dan peningkatan akses sertifikasi kompetensi
- Penguatan dan pendampingan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar mau menyekolahkan anaknya di Pendidikan khusus.



### 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program **Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik** dengan **capaian realisasi** tahun 2025 **100%** dan telah mencapai **target** yang ditetapkan sebesar **100%**. Apabila ditinjau dari tingkat **kualifikasi** pendidikan Guru SMA, SMK dan SLB minimal S1/D4 pada tahun 2025 sebesar **95,41%** dan masih terdapat Guru yang belum S1/D4 sebesar **4,59%**, namun capaian **sertifikasi profesi** Guru SMA, SMK dan SLB baru mencapai **68,76%** dan masih terdapat **31,24%** Guru yang belum mendapatkan sertifikasi profesi.

**Tabel 3.10. Rekapitulasi Data Guru SMA/SMK/SLB**

NO	KABUPATEN/KOTA	<S1		S1 SEDERAJAT		>S1		TOTAL		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kab. Badung	63	58	612	853	124	148	799	1.059	1.858
2	Kab. Bangli	4	5	306	357	66	41	376	403	779
3	Kab. Buleleng	32	28	855	1.038	125	124	1.012	1.190	2.202
4	Kota Denpasar	70	71	778	1.218	154	259	1.002	1.548	2.550
5	Kab. Gianyar	54	44	555	724	101	95	710	863	1.573
6	Kab. Jembrana	11	11	374	409	37	28	422	448	870
7	Kab. Karangasem	21	20	477	498	79	69	577	587	1.164
8	Kab. Klungkung	20	13	293	297	48	43	361	353	714
9	Kab. Tabanan	24	38	372	536	59	50	455	624	1.079
<b>JUMLAH</b>		<b>299</b>	<b>288</b>	<b>4.622</b>	<b>5.930</b>	<b>793</b>	<b>857</b>	<b>5.714</b>	<b>7.075</b>	<b>12.789</b>

**Hambatan** atau **kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi kinerja program, sebagai berikut :

- Pelaksanaan distribusi guru telah dilaksanakan secara optimal melalui pengangkatan Guru PPPK penuh dan paruh waktu namun masih terdapat kekurangan jumlah Guru pada mata pelajaran tertentu
- Terbatasnya kuota yang alokasikan oleh Kemendikdasmen terhadap pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang merupakan syarat Guru dalam memperoleh sertifikat pendidik.

**Pelaksanaan program/kegiatan** dalam rangka mendukung capaian realisasi kinerja program, meliputi :

- Terhadap masih terdapatnya kekurangan Guru pada mata pelajaran tertentu maka dilakukan upaya pengangkatan Guru PJLP dan Guru Honor BOSP/Komite



- Berkoordinasi dengan Kemendikdasmen agar dapat diupayakan penambahan kuota PPG untuk Provinsi Bali
- Kegiatan bimbingan teknis dalam rangka persiapan dan pemantapan pelaksanaan PPG.

#### 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program, sebagai berikut :

**Tabel 3.11. Indikator Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

No	Indikator Proram	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	81,9	82,72	83,40	100,82

**Analisis Ketercapaian** Indikator Kinerja Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, sebagai berikut :

Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan : menggambarkan perbandingan antara jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan terhadap seluruh jumlah pemuda. Pada tahun 2025 **realisasi capaian** sebesar **83,40%**, telah memenuhi dari **target** sebesar **82,72%** dan mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar **1,5%**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan sehingga kedepannya perlu dilakukan penguatan kapasitas, perluasan kolaborasi, dan optimalisasi program kerja yang lebih dinamis dan inovatif.

**Hambatan** atau **kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi kinerja program, sebagai berikut :

- Dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dikalangan pemuda
- Belum maksimalnya kesadaran pemuda akan pentingnya pengembangan diri melalui organisasi dan lebih dominan memprioritaskan waktu untuk bekerja, sosialitas, dan bermedia social

**Pelaksanaan program/kegiatan** dalam rangka mendukung capaian realisasi kinerja program, meliputi :



- Pelaksanaan berbagai kegiatan seleksi dan pembinaan pemuda pelopor, kepemimpinan, wirausaha muda, dan pramuka dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan daya saing pemuda
- Penguatan organisasi kepemudaan yang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi, pengembangan kreativitas, dan advokasi kebijakan
- Pembekalan ketrampilan teknologi digital bagi pemuda
- Kegiatan forum diskusi pemuda untuk menghimpun aspirasi, saran pendapat, dan merumuskan gagasan inovatif guna mendorong partisipasi aktif pemuda
- Pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi

## 5. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program, sebagai berikut :

**Tabel 3.12. Indikator Kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

No	Indikator Progam	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	Target
1	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	52,86	53,39	53,41	100,04

**Analisis Ketercapaian** Indikator Kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, sebagai berikut :

Persentase Cabang olahraga yang Berprestasi : menggambarkan perbandingan antara jumlah cabang olahraga yang berprestasi terhadap jumlah seluruh cabang olahraga. Pada tahun 2025 **realisasi capaian** sebesar **53,41%** dan telah memenuhi dari **target** sebesar **53,39%**, realisasi capaian meningkat dari tahun 2024 sebesar **0,55%**. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan prestasi terhadap cabang olahraga tertentu sehingga kedepannya perlu dilakukan upaya pembinaan yang berkelanjutan.

**Hambatan** atau **kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi kinerja program, sebagai berikut :

- Terbatasnya anggaran (APBD) sehingga terbatasnya cabang olahraga yang mengikuti pekan kejuaraan
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar



- Belum meratanya prestasi antar cabang olahraga

**Pelaksanaan program/kegiatan** dalam rangka mendukung capaian realisasi kinerja program, meliputi :

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi secara berkesinambungan, meliputi: Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR), Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (PEPARPEPROV), Sepak Bola Amatir, dan Invitasi Olahraga Tradisional
- Keikutsertaan aktif kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga di tingkat Nasional dan Internasional, meliputi : Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS XVII), Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS XI), SEA GAMES dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII NTB.
- Penguatan cabang olahraga berprestasi melalui dukungan sarana prasarana dan pembinaan yang lebih intensif
- Pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi melalui sentra pembinaan olahragawan berbakat nasional (SPOBNAS)
- Pembinaan intensif bagi atlet guna meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan kesiapan mental dalam pertandingan kejuaraan.

**Tabel 3.13. Rekapitulasi Cabang Olahraga yang Berprestasi**

NO	KEJUARAAN	CABANG OLAHRAGA/ MATA LOMBA	MEDALI		
			EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	POPNAS XVII	Judo	3	5	4
		Renang	2	3	3
		Taekwondo	2	0	2
		Pencak Silat	1	0	4
		Menembak	1	0	2
		Tenis Meja	0	2	1
		Tinju	0	2	0
		Atletik	0	1	2
		Wushu	0	1	1
		Senam Ritmik	0	1	0
		Angkat Besi	0	0	3
Senam Artistik	0	0	1		
2	PEPARPENAS XI	Para Atletik	6	1	0
		Para Renang	5	2	1
3	SEA GAMES	Atletik	1	0	1
		Baseball	0	1	0
		Bola Basket	1	0	2
		Bulu Tangkis	0	1	0



		Cricket	0	1	1
		Esport	0	0	1
		Judo	1	1	0
		Kabaddi	1	4	1
		Karate	0	1	2
		Menembak	0	2	0
		Skateboard	0	1	0
		Taekwondo	0	0	1
		Woodball	0	2	0
4	FORNAS (FESTIVAL OLAHRAGA MASYARAKAT NASIONAL) VIII NTB	WBN	5	5	3
		KBI	4	2	0
		ADYTI	3	0	0
		AKTI	2	3	0
		ABU	2	0	0
		ILDI	1	1	1
		BBOY INDO	1	2	0
		PPYNI	1	1	0
		POGTI	1	1	0
		PERGATSI	1	0	0
		KOSTI	0	1	2
		FOKBI	0	1	1
		PORPI	0	1	1
		FESPATI	0	1	0
		AMD I	0	1	0
		APSI	0	0	2
		SUP.ID	0	0	2
		ABI	0	0	2
		ATNI	0	0	2
		IOF	0	0	1
		IESPA	0	0	1
		PELANGI	0	0	1
<b>Jumlah :</b>			<b>45</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

## 6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang merupakan fasilitasi pemberian dana **Hibah** kepada **Kwarda Pramuka Bali** untuk dukungan biaya operasional kantor, kegiatan pelatihan dan pembinaan anggota pramuka, pelaksanaan jambore daerah, dan kegiatan perkemahan saka pramuka. Program ini dalam rangka mendukung capaian indikator program **persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan** dengan **realisasi capaian** sebesar **90,4%** dan telah melampaui **target** sebesar **60,60%**, realisasi capaian meningkat dari tahun 2024 sebesar **30,4%**.



## 7. Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal)

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yang ditujukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja program **persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal**, dengan **target** yang ditetapkan sebesar **63,75%** dan **realisasi capaian** sebesar **64,75%** terjadi peningkatan dari tahun 2024 sebesar **2,25%**.

**Hambatan** atau **kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi kinerja program, sebagai berikut :

- Pengaruh perkembangan teknologi digital dan kurangnya edukasi orang tua terhadap anak tentang penerapan nilai-nilai kearifan lokal
- Belum meratanya pemahaman Guru terhadap kurikulum muatan lokal

**Pelaksanaan program/kegiatan** dalam rangka mendukung capaian realisasi kinerja program, meliputi :

- Pelatihan dan pembinaan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
- Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai kearifan lokal di satuan pendidikan.

## 8. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang ditujukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja program **nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan**, dengan **target** sebesar **73,12%** dan **realisasi capaian** sebesar **73,70%**, terjadi peningkatan dari tahun 2024 sebesar **1,30%**.

**Hambatan** atau **kendala** yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi kinerja program, sebagai berikut :

- Masih rendahnya minat peserta didik terhadap bahasa dan aksara Bali

**Pelaksanaan program/kegiatan** dalam rangka mendukung capaian realisasi kinerja program, meliputi :

- Penggunaan keyboard aksara Bali dalam mendukung proses pembelajaran bahasa Bali yang lebih inovatif
- Monitoring dan pembinaan perkembangan peserta didik terhadap penguasaan bahasa dan aksara Bali.



### 3.2. Realisasi Anggaran

Berikut kami sampaikan rencana dan realisasi anggaran yang dijabarkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program/kegiatan pada tahun 2025, sebagaimana rincian tabel berikut :

**Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.930.882.791.147,00</b>	<b>1.494.648.635.627,10</b>	<b>77,41%</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.307.121.003.386,00</b>	<b>910.611.114.929,00</b>	<b>69,67%</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>185.200.900,00</b>	<b>110.553.877,00</b>	<b>59,69%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.429.500,00	50.693.815,00	65,47%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.771.400,00	59.860.062,00	55,54%
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.293.262.292.519,00</b>	<b>898.733.618.148,00</b>	<b>69,49%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.291.832.286.219,00	897.345.317.625,00	69,46%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.284.575.800,00	1.255.478.500,00	97,73%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	145.430.500,00	132.822.023,00	91,33%
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>766.145.000,00</b>	<b>734.137.300,00</b>	<b>95,82%</b>
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	766.145.000,00	734.137.300,00	95,82%
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>68.193.400,00</b>	<b>67.066.092,00</b>	<b>98,35%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	68.193.400,00	67.066.092,00	98,35%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.129.444.610,00</b>	<b>949.981.137,00</b>	<b>84,11%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	616.832.360,00	562.497.184,00	91,19%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000,00	89.357.500,00	94,06%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.840.000,00	8.916.390,00	82,25%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	31.526.250,00	26.352.000,00	83,59%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.246.000,00	262.858.063,00	70,05%



	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.509.311.957,00</b>	<b>7.007.293.094,00</b>	<b>82,35%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	978.222.150,00	807.419.687,00	82,54%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.531.089.807,00	6.199.873.407,00	82,32%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.200.415.000,00</b>	<b>3.008.465.281,00</b>	<b>94,00%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	954.685.000,00	812.833.100,00	85,14%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.977.200.000,00	1.928.174.269,00	97,52%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.530.000,00	267.457.912,00	99,60%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>623.701.468.661,00</b>	<b>583.991.558.678,10</b>	<b>93,63%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>293.515.552.474,00</b>	<b>279.592.074.862,00</b>	<b>95,26%</b>
	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	68.000.000.000,00	66.250.897.900,00	97,43%
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3.000.000.000,00	2.887.436.700,00	96,25%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	1.980.000.000,00	1.910.480.000,00	96,49%
	Sub Kegiatan Pengadaan alat Praktek dan Peraga Peserta Didik	382.366.000,00	381.824.003,00	99,86%
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.704.150.000,00	4.424.232.449,00	94,05%
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.768.028.800,00	2.240.371.572,00	80,94%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	27.034.056.126,00	26.859.488.373,00	99,35%
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	77.120.000,00	73.643.740,00	95,49%
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	125.380.000,00	113.656.250,00	90,65%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	165.426.169.948,00	158.816.005.977,00	96,00%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	57.409.900,00	54.025.333,00	94,10%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	76.299.900,00	68.166.750,00	89,34%
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	44.690.000,00	41.927.850,00	93,82%
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang kelas Baru	8.871.116.400,00	8.533.684.208,00	96,20%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	86.942.800,00	80.216.000,00	92,26%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.881.822.600,00	6.856.017.757,00	63,00%



	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>305.551.944.844,00</b>	<b>281.553.591.336,60</b>	<b>92,15%</b>
	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	22.612.384.000,00	21.545.770.400,00	95,28%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.150.616.000,00	10.642.894.000,00	95,45%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	3.914.925.900,00	3.630.371.550,00	92,73%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	47.370.185.000,00	47.238.059.033,60	99,72%
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5.633.745.400,00	5.374.220.085,00	95,39%
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.718.208.400,00	1.667.194.202,00	97,03%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	16.854.550.194,00	14.554.422.576,00	86,35%
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	88.862.000,00	59.915.980,00	67,43%
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	460.992.000,00	440.815.690,00	95,62%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	182.279.551.870,00	164.613.286.490,00	90,31%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	51.250.000	49.596.800,00	96,77%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.600.000	34.193.690,00	90,94%
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	68.960.000,00	65.710.860,00	95,29%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.012.000.000,00	3.944.381.000,00	98,31%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	9.211.539.880,00	7.612.930.980,00	82,65%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	86.574.200,00	79.828.000,00	92,21%
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>24.633.971.343,00</b>	<b>22.845.892.479,50</b>	<b>92,74%</b>
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.880.000.000,00	1.751.895.534,72	93,19%
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.523.966.200,00	3.346.270.232,00	94,96%
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.322.189.000,00	766.274.153,00	57,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	3.487.687.843,00	3.174.730.130,00	91,03%
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	752.324.300,00	679.704.762,00	90,35%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.264.294.800,00	10.872.607.262,00	96,52%



	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.025.850,00	96,64%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	90.910.000,00	80.278.760,00	88,31%
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.171.600,00	15.382.020,00	95,12%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.918.000.000,00	1.799.264.297,78	93,81%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	362.880.000,00	344.459.478,00	94,92%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>60.319.100,00</b>	<b>45.962.020,00</b>	<b>76,20%</b>
	<b>Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>	<b>60.319.100,00</b>	<b>45.962.020,00</b>	<b>76,20%</b>
	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	26.079.400,00	23.321.600,00	89,43%
	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.239.700,00	22.640.420,00	66,12%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>95.056.488.300,00</b>	<b>86.250.859.824,00</b>	<b>90,74%</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>10.986.468.200,00</b>	<b>3.984.301.480,00</b>	<b>36,27%</b>
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>10.986.468.200,00</b>	<b>3.984.301.480,00</b>	<b>36,27%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	9.731.599.800,00	3.231.166.419,00	33,20%
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	36.390.000,00	4.126.701,00	11,34%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	148.051.900,00	36.380.960,00	24,57%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	192.831.500,00	16.668.000,00	8,64%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	778.887.500,00	616.883.472,00	79,20%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	98.707.500,00	79.075.928,00	80,11%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>82.570.020.100,00</b>	<b>80.766.558.344,00</b>	<b>97,82%</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	<b>21.493.180.100,00</b>	<b>19.705.533.344,00</b>	<b>91,68%</b>
	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	14.310.452.700,00	13.184.702.273,00	92,13%



	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	7.182.727.400,00	6.520.831.071,00	90,78%
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>316.840.000,00</b>	<b>301.025.000,00</b>	<b>95,01%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	316.840.000,00	301.025.000,00	95,01%
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>60.760.000.000,00</b>	<b>60.760.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	60.760.000.000,00	60.760.000.000,00	100,00%
6	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.997.568.065,00</b>	<b>1.913.295.536,00</b>	<b>95,78%</b>
7	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>834.206.065,00</b>	<b>790.008.372,00</b>	<b>94,70%</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>169.801.800,00</b>	<b>139.086.807,00</b>	<b>81,91%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.084.200,00	110.776.312,00	79,65%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.499.600,00	2.804.380,00	80,13%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.218.000,00	25.506.115,00	93,71%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>556.164.265,00</b>	<b>556.164.265,00</b>	<b>100,00%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556.164.265,00	556.164.265,00	100,00%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.240.000,00</b>	<b>94.757.300,00</b>	<b>87,54%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.400.000,00	85.532.300,00	86,92%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1.440.000,00	1.350.000,00	93,75%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	7.875.000,00	93,75%
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.163.362.000,00</b>	<b>1.123.287.164,00</b>	<b>96,56%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>685.647.000,00</b>	<b>664.484.082,00</b>	<b>96,91%</b>
	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	94.290.000,00	93.472.000,00	99,13%
	Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.040.000,00	13.968.000,00	99,49%
	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	31.636.000,00	28.665.286,00	90,61%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	545.681.000,00	528.378.796,00	96,83%
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>477.715.000,00</b>	<b>458.803.082,00</b>	<b>96,04%</b>
	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	77.760.000,00	77.142.000,00	99,21%



	Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13.950.000,00	11.680.000,00	83,73%
	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	31.374.000,00	30.870.286,00	98,39%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	354.631.000,00	339.110.796,00	95,62%
	<b>UPTD BPTKK</b>			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>737.186.735,00</b>	<b>652.703.810,00</b>	<b>88,54%</b>
9	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>575.748.635,00</b>	<b>509.135.978,00</b>	<b>88,43%</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>32.440.600,00</b>	<b>27.403.712,00</b>	<b>84,47%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.613.000,00	6.162.900,00	71,55%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.547.600,00	3.960.812,00	60,49%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.280.000,00	17.280.000,00	100,00%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>452.498.035,00</b>	<b>423.198.166,00</b>	<b>93,52%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.498.035,00	423.198.166,00	93,52%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.810.000,00</b>	<b>58.534.100,00</b>	<b>64,46%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.810.000,00	58.534.100,00	64,46%
10	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>102.298.100,00</b>	<b>95.798.952,00</b>	<b>93,65%</b>
	<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	<b>67.654.800,00</b>	<b>65.283.616,00</b>	<b>96,50%</b>
	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	67.654.800,00	65.283.616,00	96,50%
	<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</b>	<b>34.643.300,00</b>	<b>30.515.336,00</b>	<b>88,08%</b>
	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	34.643.300,00	30.515.336,00	88,08%
11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>59.140.000,00</b>	<b>47.768.880,00</b>	<b>80,77%</b>
	<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>59.140.000,00</b>	<b>47.768.880,00</b>	<b>80,77%</b>
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	59.140.000,00	47.768.880,00	80,77%

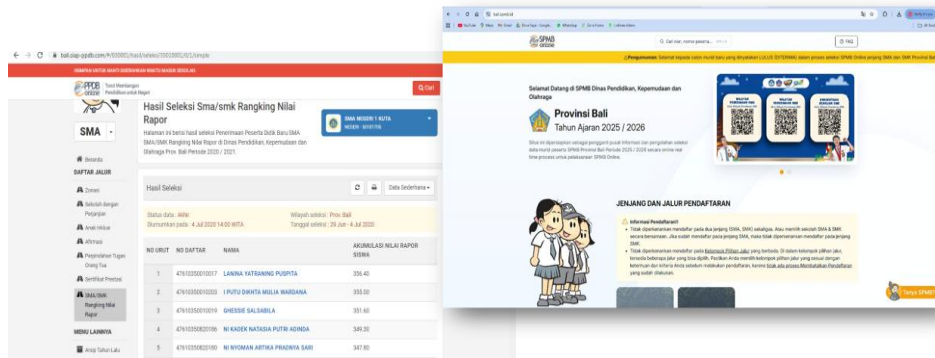
Pagu Anggaran Belanja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.028.674.034.274,00 dan terserap secara keseluruhan sebesar Rp. 1.583.465.494.797,10 atau 78,05%. Sisa anggaran sebesar Rp. 445.208.539.449,90 atau 21,95% yang merupakan upaya efisiensi belanja untuk mengurangi defisit APBD Provinsi Bali.



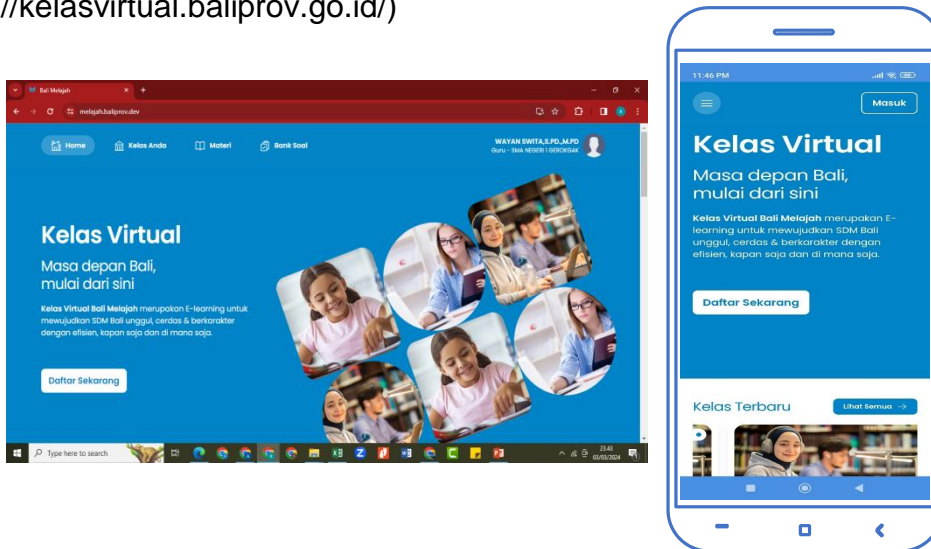
### 3.3. Inovasi

Tantangan global dan perkembangan teknologi menuntut penyelenggaraan pemerintahan agar bergerak lebih dinamis, kreatif, dan inovatif. Reformasi Birokrasi dibangun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik, berikut disampaikan inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

- a. Sistem aplikasi berbasis web untuk memfasilitasi penerimaan murid baru SMA dan SMK Negeri se-Bali (<https://bali.spmb.id>)



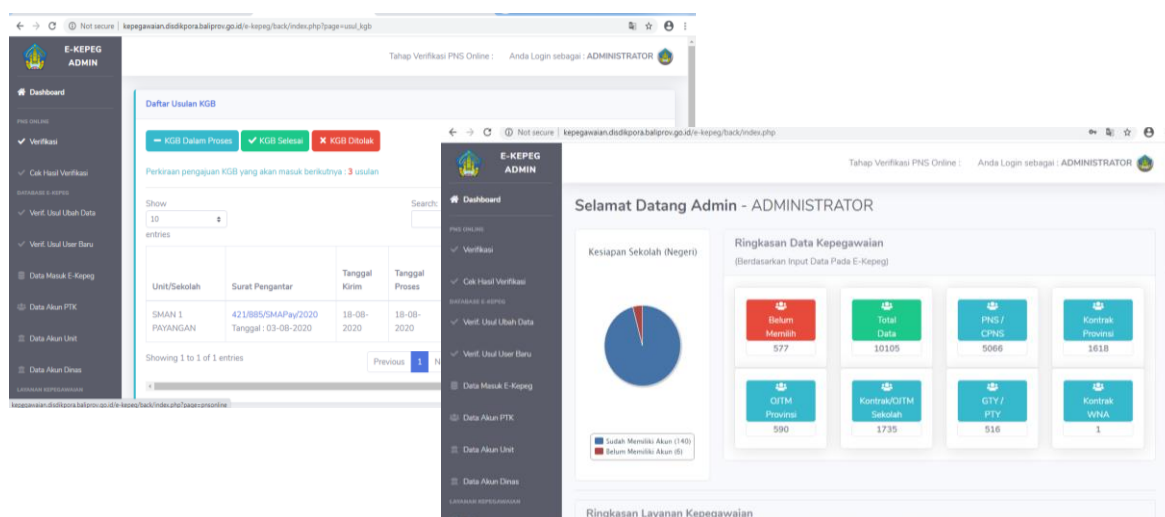
- b. Kelas Virtual Portal Bali Malajah merupakan adaptif e-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas, berkarakter yang bersifat adaptif terhadap dinamika perkembangan TIK dan kebutuhan Pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh Guru, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik SMA/SMK sehingga belajar menjadi lebih mudah, kapan saja dan dimana saja (<https://kelasvirtual.baliprov.go.id/>)



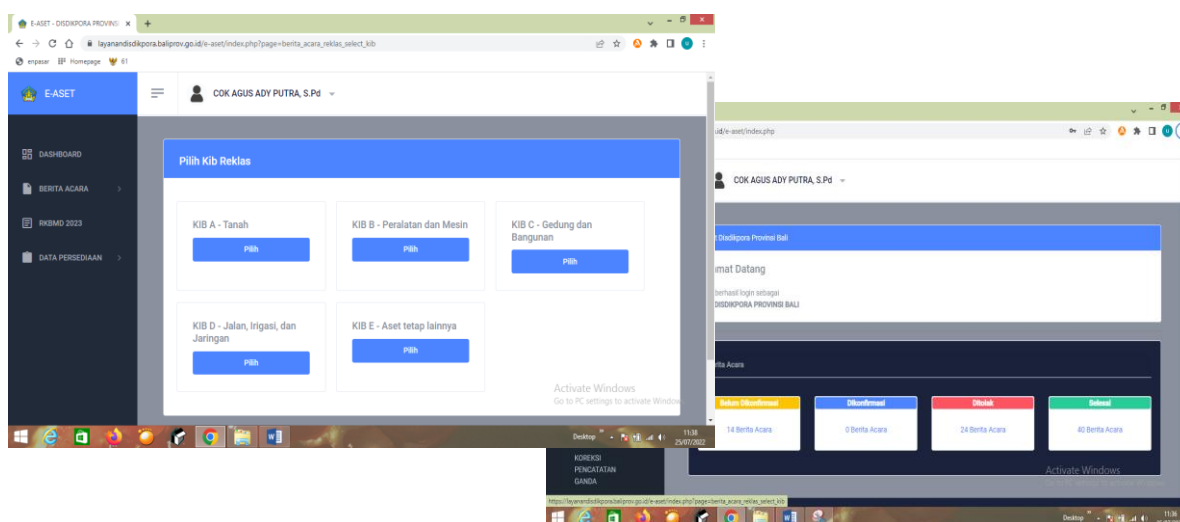
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- c. Aplikasi E-Kepegawaian memberikan kemudahan dalam mengurus layanan kepegawaian seperti: pengajuan cuti, kenaikan gaji berkala, pengajuan karis/karsu, pengajuan karpeg, pengajuan ijin belajar, pengajuan tugas belajar, pengajuan kenaikan jabatan fungsional, pengajuan kenaikan pangkat, pengajuan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), pengajuan Peninjauan Masa Kerja (PMK), dan pengajuan pensiun. (<https://layanandisdikpora.baliprov.go.id/koneksi/>)



- d. Aplikasi E-Aset dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi sekolah dalam penyusunan RKBMD dan Persediaan Barang Habis Pakai. Sistem E-Aset dapat memberikan laporan persediaan secara realtime, sehingga kita dapat mengetahui jumlah barang persediaan dari masing-masing sekolah ketika diperlukan sewaktu waktu. (<https://layanandisdikpora.baliprov.go.id/simade/>)



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala yang akan menjadi perhatian, pertimbangan ataupun rujukan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait urusan, kewenangan dan tata kelola layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di masa yang akan datang dalam mendukung capaian sasaran strategis, sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi para pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di tahun-tahun selanjutnya

Secara umum capaian program, kegiatan, dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut memerlukan perhatian, komitmen, dan dukungan aktif dari segenap komponen. Langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan Akuntabel.


Meskipun terdapat sejumlah indikator yang masih belum berhasil capaiannya, namun secara keseluruhan capaian Kinerja Disdikpora Provinsi Bali tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan yaitu :

- a. Peningkatan akses Pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi pembangunan unit sekolah baru, pembangunan/rehabilitasi ruang kelas dan sarana utilitas lainnya, pengadaan media pembelajaran, alat praktek siswa, dan mebeler sekolah, sosialisasi dan advokasi pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, penyaluran dana pendamping operasional sekolah (BOSDA), pengadaan perlengkapan peserta didik dan penyaluran dana Pendidikan (PIP) bagi siswa kurang mampu;



- b. Peningkatan mutu Pendidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, pelatihan pemanfaatan media pembelajaran dan aplikasi digital, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, serta penguatan literasi, numerasi, dan karakter siswa.
- c. Peningkatan tatakelola Pendidikan melalui pembinaan aparatur dan manajerial sekolah, reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, penatausahaan aset sekolah, penguatan administrasi dan pelaporan keuangan sekolah.
- d. Peningkatan daya saing dan kemandirian pemuda melalui berbagai kegiatan pelatihan dan seleksi kepemimpinan, pemuda pelopor, dan wirausaha muda, penguatan peran organisasi kepemudaan, forum diskusi pemuda, dan peningkatan ketrampilan teknologi digital.
- e. Peningkatan prestasi olahraga melalui pembibitan dan pembinaan tenaga keolahragaan, penguatan organisasi keolahragaan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar, penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga di tingkat Provinsi, Regional, Nasional, dan Internasional.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Ditandatangani secara elektronik oleh:
	KEPALA DINAS
	<b>Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, S.T., M.Si.</b>
	Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19740221 200003 1 005





ပိမိၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉ

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

တၢ်မိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉ  
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI BALI TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 43);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

**KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Provinsi Bali di Bali;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali; dan
8. Yang bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI  
 NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
 PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 PROVINSI BALI TAHUN 2024 - 2026

Indikator Kinerja Utama


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
							I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	Perbandingan penduduk disemua usia yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah dengan jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase	$\frac{\text{Jml. seluruh siswa SMA/MA/SMK/Sederajat}}{\text{Jml. penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$	Disdikpora. Prov. Bali	101,25	101,50	101,75		
			Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Baik	Perbandingan sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang memperoleh akreditasi baik (A/B) dengan seluruh sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan dinyatakan dalam persentase	$\frac{\text{Jml. SMA/SMK/SLB Terakreditasi A/B}}{\text{Jml. SMA/SMK/SLB}} \times 100\%$	Disdikpora. Prov. Bali	93	93,10	93,20		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2	Terwujudnya Daya saing Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	Perbandingan jumlah pemuda yang memperoleh prestasi/juara dalam bidang seni dan budaya, IPTEK, kewirausahaan, industri kreatif dan olahraga dengan seluruh pemuda di Provinsi Bali dinyatakan dalam persentase	$\frac{\text{Jml. Pemuda Yang Berprestasi}}{\text{Jml. Pemuda}} \times 100\%$	Disdikpora. Prov. Bali	60,00	61,00	62,00		
			Persentase Prestasi Olahraga	perbandingan jumlah atlet yang memperoleh medali/juara dalam kejuaraan olahraga di tingkat Regional, Nasional, dan Internasional (Pra POPNAS, POPNAS, PON, PEPARNAS, PEPARPENAS, FORNAS, KEJURNAS, SEA GAMES, ASIAN GAMES, OLIMPIADE) dengan seluruh atlet binaan Provinsi Bali dinyatakan dalam persentase	$\frac{\text{Jml. atlet Yang berprestasi}}{\text{Jml. atlit}} \times 100\%$	Disdikpora. Prov. Bali	51,50	51,55	51,60		


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 KEPALA DINAS  
**Dr. KN. Boy Jayawibawa**  
 NIP. 19651130 199203 1 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. KN. BOY JAYAWIBAWA

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2025

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali,



DR. KN. BOY JAYAWIBAWA

NIP. 1951130 199203 1 010

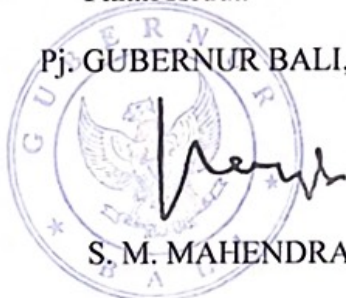
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI BALI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	101,50%
		Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Baik	93,10%
2.	Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	61%
		Persentase Prestasi Olahraga	51,55%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.336.384.678.703,00	
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	631.110.920.522,00	
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.999.100,00	
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.949.998.400,00	
5.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	84.427.532.632,00	
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000,00	
7.	Program Pengembangan Kurikulum	126.764.100,00	
8.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	85.000.000,00	

Pihak Kedua

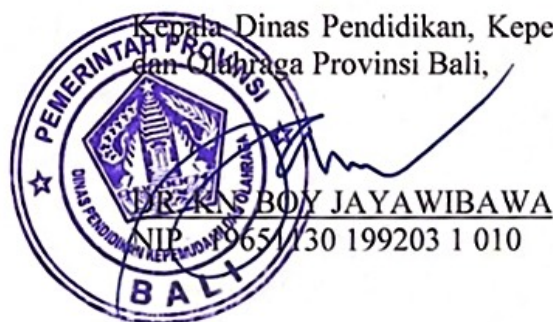
Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali,



DR. AN BOY JAYAWIBAWA

NIP. 6511301992031010